

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk hasil hutan. Produk yang dihasilkan dapat berupa hasil hutan berupa kayu atau hasil hutan non kayu. Secara lebih luas, hutan jenis produksi juga meliputi pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pengambilan hasil hutan, baik kayu serta non kayu. Hakikatnya hutan memberikan pengaruh besar bagi kehidupan manusia, pengelolaan hutan yang baik dan lestari dapat memberikan kontribusi besar kepada alam dan manusia. Hasil hutan menjadi bahan pokok sandang, papan dan juga pangan yang mampu mendorong kesejahteraan hidup masyarakat. Menurut Simon (1994), pembangunan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi nasional atau regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Daerah yang masih terbelakang, pembangunan kesejahteraan masyarakat yang pertama kali perlu dikerjakan adalah pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pangan, papan, pakaian dan biaya pendidikan. Berdasarkan itu, maka peranan kehutanan di pedesaan sangat penting, karena dapat menyediakan lapangan pekerjaan dan menyediakan bahan baku untuk berbagai macam industri. Pemerintah memberikan wewenang pengelolaan hutan produksi kepada instansi yang ditunjuk oleh pemerintah yaitu perusahaan umum (Perum) Perhutani, yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia (UU RI) nomor 72 tahun 2010 tentang perum kehutanan negara.

Perhutani adalah badan usaha milik negara (BUMN) berbentuk Perum, yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola sumberdaya hutan produksi milik negara di pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. Perhutani di Jawa dibagi menjadi tiga divisi regional, yaitu Perhutani Jawa Timur (Divisi Regional I), Perhutani Jawa Tengah (Divisi Regional II), dan Perhutani Jawa Barat (Divisi Regional III). KPH Banten merupakan wilayah administratif regional III Jawa Barat yang mempunyai wilayah terluas dalam pengelolaan kawasan hutan baik produksi, hutan lindung, dan hutan rakyat serta telah memperoleh sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dengan masa berlaku 11 Mei 2016 – 10 Mei 2021 yang bersifat mandatori dan sertifikat voluntary FM-FSC.

1.2 Tujuan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka Praktik Kerja Lapang (PKL) yang dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten bertujuan untuk menguraikan kegiatan pengelolaan pada hutan produksinya serta mengidentifikasi aspek konservasi pada kegiatan pengelolaan hutan produksi bersangkutan.

1.3 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini sebagai berikut :





1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan juga bermanfaat antara Perhutani KPH Banten sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Di Perum Perhutani KPH Banten
2. Mahasiswa dapat mengetahui secara langsung Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi Khususnya Jati Di Perum Perhutani KPH Banten
3. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, sebagai media dalam menyalurkan lulusan ke dunia kerja.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.